



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp5.762.478.059,00 (*lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.153.285.898.059,00 (*satu triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp137.500.000.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*), berkurang sebesar Rp22.613.151.069,00 (*dua puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp114.886.848.931,00 (*seratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp1.613.151.069,00 (*satu miliar enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp6.886.848.931,00 (*enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (*tujuh puluh miliar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);

- h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.070.000.000,00 (*tiga miliar tujuh puluh juta rupiah*).
 - (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua miliar enam ratus juta rupiah*).
 - (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).
 - (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
 - (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
 - (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, semula direncanakan sebesar Rp2.230.000.000,00 (*dua miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (*Enam belas miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;

- b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.165.000.000,00 (*dua miliar seratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.195.000.000,00 (*tiga belas miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (*tujuh puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian
 - g. pendapatan BLUD; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp425.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp0,00

- (*nihil*) bertambah sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp165.166.000,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.834.834.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp165.166.000,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp165.166.000,00 (*seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp81.000.000.000,00 (*delapan puluh satu miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp994.033.420.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp27.399.794.198,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.021.433.214.198,00 (*satu triliun dua puluh satu*

miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp941.493.402.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp3.800.205.802,00 (*tiga miliar delapan ratus juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp937.693.196.198,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri dari:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. dana insentif daerah;
 - f. dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp10.519.878.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.936.179.050,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.456.057.050,00 (*dua belas miliar empat ratus lima puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp566.916.958.000,00 (*lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

- Rp81.463.745.000,00 (*delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d semula direncanakan sebesar Rp160.493.646.000,00 (*seratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp9.087.792.852 (*sembilan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp151.405.853.148,00 (*seratus lima puluh satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (7) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp21.071.841.000,00 (*dua puluh satu miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f semula direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.351.408.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp104.378.742.000,00 (*seratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp52.540.018.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp83.740.018.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.500.000.000,00 (*empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan miliar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp39.240.018.000 (*tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh ribu delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp965.834.930,00

(sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.965.834.930,00 *(enam belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - d. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 *(nihil)*.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 *(nihil)*.
- (4) pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 *(enam belas miliar rupiah)* bertambah sebesar Rp965.834.930,00 *(sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp16.965.834.930,00 *(enam belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)*.
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 *(nihil)*.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 *(satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp120.429.778.157,00 *(seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp1.267.963.198.157,00 *(satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta*

seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp820.819.472.066,00 (*delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp48.769.534.177,00 (*empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp869.589.006.243,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp13.797.636.072,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp493.338.142.708,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp3.666.471.912,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp302.287.437.198,00 (*tiga ratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp7.378.500.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.378.500.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp14.462.970.000,00 (*empat belas miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp51.729.916.337,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp66.192.886.337,00 (*enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp599.758.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp207.718.000,00 (*dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp392.040.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp13.797.636.072,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp493.338.142.708,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - e. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - f. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - g. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp358.211.405.382,00 (*tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus sebelas juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp11.479.303.117,00 (*sebelas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus tujuh belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp346.732.102.265,00 (*tiga ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp30.950.436.172,00 (*tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp3.170.558.898,00 (*tiga miliar seratus tujuh puluh lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*)

sehingga menjadi sebesar Rp27.779.877.274,00 (*dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*) berkurang sebesar Rp76.800.000,00 (*tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp55.200.000,00 (*lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp92.350.864.336,00 (*sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp419.187.499,00 (*empat ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp92.770.051.835,00 (*sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp13.328.870.000,00 (*tiga belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp507.760.000,00 (*lima ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.821.110.000,00 (*dua belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp166.313.778,00 (*seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp706.800.000,00 (*tujuh ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp115.800.000,00 (*seratus lima belas juta*

delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp591.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp11.421.089.112,00 (*sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah*) bertambah sebesar Rp1.056.598.444,00 (*satu miliar lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp12.477.687.556,00 (*dua belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp3.666.471.912,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp302.287.437.198,00 (*tiga ratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*). yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp Rp38.210.999.985,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan*

ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp306.624.589,00 (tiga ratus enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.517.624.574,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp82.082.587.604,00 (*delapan puluh dua miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah*) berkurang sebesar Rp1.052.591.654,00 (*satu miliar lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp81.029.995.950,00 (*delapan puluh satu miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp9.325.200.700,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp165.945.064,00 (*seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.491.145.764,00 (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp48.957.319.892,00 (*empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp4.962.928.963,00 (*empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp53.920.248.855,00 (*lima puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.989.163.866,00 (*lima miliar*

sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp9.841.548,00 (*sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp5.979.322.318,00 (*lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp sebesar Rp45.446.690.000,00 (*empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp68.609.003.239,00 (*enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan juta tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) berkurang sebesar Rp706.593.502,00 (*tujuh ratus enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp67.902.409.737,00 (*enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp170.405.785.934,00 (*seratus tujuh puluh miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp60.662.229.105,00 (*enam puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp231.068.015.039,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar enam puluh delapan juta lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:, yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.747.238.238,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp868.173.079,00 (*delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp19.615.411.317,00 (*Sembilan belas miliar enam ratus lima belas juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.467.018.000,00 (*enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp14.862.746.567,00 (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp82.329.764.567,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp83.355.169.696,00 (*delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp45.005.186.024,00 (*empat puluh lima miliar lima juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp128.360.355.720,00 (*seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp256.360.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp82.690.000,00 (*delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar

Rp339.050.000,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp156.566.565,00 (*seratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp423.433.435,00 (*empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp10.700.000.000,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.300.000.000,00 (*empat miliar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula direncanakan sebesar Rp141.308.162.000,00 (*seratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp21.698.014.875,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp163.006.176.875,00 (*seratus enam puluh tiga miliar enam juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - c. belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
 - d. belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp3.906.125,00 (*tiga juta sembilan ratus enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp656.093.875,00 (*enam ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.365.828.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp18.350.513.000,00 (*delapan belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp57.716.341.000,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.351.408.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp104.378.742.000,00 (*seratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi sebesar

Rp114.677.300.098,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 20-10-2023
BUPATI TANA TORAJA,

THEOPHILUS ALLOREERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 20-10-2023
R. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

MUHAMMAD SAFAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 52

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137.500.000.000	114.886.848.931	(22.613.151.069)	16 %
4.1.01	Pajak Daerah	22.000.000.000	22.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.070.000.000	3.070.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	570.000.000	570.000.000	0	0 %
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	570.000.000	570.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	0	25.000.000	25.000.000	100 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0	25.000.000	25.000.000	100 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0	25.000.000	25.000.000	100 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.230.000.000	2.205.000.000	(25.000.000)	1 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.230.000.000	2.205.000.000	(25.000.000)	1 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.230.000.000	2.205.000.000	(25.000.000)	1 %
4.1.02	Retribusi Daerah	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.165.000.000	2.165.000.000	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000	300.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	465.000.000	465.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	465.000.000	465.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.000.000	160.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.000.000	160.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	190.000.000	190.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	190.000.000	190.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.195.000.000	13.195.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	310.000.000	310.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	590.000.000	590.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	350.000.000	350.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	855.000.000	855.000.000	0	0 %
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	855.000.000	855.000.000	0	0 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	200.000.000	200.000.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.000.000	10.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.180.000.000	3.180.000.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.180.000.000	3.180.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.700.000.000	7.700.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.700.000.000	7.700.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	640.000.000	640.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000	600.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000	600.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	40.000.000	40.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	40.000.000	40.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000	6.886.848.931	(1.613.151.069)	19 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.500.000.000	6.886.848.931	(1.613.151.069)	19 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000	6.886.848.931	(1.613.151.069)	19 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000	6.886.848.931	(1.613.151.069)	19 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.000.000.000	70.000.000.000	(21.000.000.000)	23 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000	425.000.000	(75.000.000)	15 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	60.000	60.000	100 %
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	60.000	60.000	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0	20.394.000	20.394.000	100 %
4.1.04.01.05.0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	0	20.394.000	20.394.000	100 %
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000	404.546.000	(95.454.000)	19 %
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500.000.000	404.546.000	(95.454.000)	19 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	75.000.000	75.000.000	100 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0	75.000.000	75.000.000	100 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0	75.000.000	75.000.000	100 %
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.990.000.000	3.990.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.990.000.000	3.990.000.000	0	0 %
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.000.000	7.000.000	0	0 %
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.000.000	7.000.000	0	0 %
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.000.000.000	3.834.834.000	(165.166.000)	4 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.000.000.000	3.834.834.000	(165.166.000)	4 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.000.000.000	3.834.834.000	(165.166.000)	4 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	165.166.000	165.166.000	100 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	159.672.000	159.672.000	100 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	159.672.000	159.672.000	100 %
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0	98.000	98.000	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0	98.000	98.000	100 %
4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0	293.000	293.000	100 %
4.1.04.15.06.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	0	293.000	293.000	100 %
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0	3.447.000	3.447.000	100 %
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0	3.447.000	3.447.000	100 %
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	1.656.000	1.656.000	100 %
4.1.04.15.84.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	1.656.000	1.656.000	100 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	81.000.000.000	60.000.000.000	(21.000.000.000)	26 %
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	80.597.799.000	58.977.278.000	(21.620.521.000)	27 %
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	80.597.799.000	58.977.278.000	(21.620.521.000)	27 %
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	127.257.000	116.525.000	(10.732.000)	8 %
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	127.257.000	116.525.000	(10.732.000)	8 %
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	274.944.000	906.197.000	631.253.000	230 %
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0	96.677.000	96.677.000	100 %
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	274.944.000	809.520.000	534.576.000	194 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	994.033.420.000	1.021.433.214.198	27.399.794.198	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	941.493.402.000	937.693.196.198	(3.800.205.802)	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	819.394.227.000	812.242.613.198	(7.151.613.802)	1 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.519.878.000	12.456.057.050	1.936.179.050	18 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	931.507.000	1.786.380.148	854.873.148	92 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.106.844.000	5.510.406.816	403.562.816	8 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	280.136.990	280.136.990	100 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	221.814.000	221.814.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.897.243.000	1.897.243.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.048.914.000	1.273.047.172	224.133.172	21 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000	1.487.028.924	173.472.924	13 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	566.916.958.000	566.916.958.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	566.916.958.000	566.916.958.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.463.745.000	81.463.745.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.000.000	495.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.623.982.000	6.623.982.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.322.542.000	6.322.542.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	26.617.700.000	26.617.700.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.062.316.000	2.062.316.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	455.623.000	455.623.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	151.172.000	151.172.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	38.735.410.000	38.735.410.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	160.493.646.000	151.405.853.148	(9.087.792.852)	6 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.446.690.000	45.330.981.035	(115.708.965)	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	64.086.952.000	63.452.005.200	(634.946.800)	1 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.118.000.000	2.115.750.000	(2.250.000)	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.869.010.000	9.482.302.900	(386.707.100)	4 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.764.450.000	2.764.450.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.547.920.000	1.447.920.000	(100.000.000)	6 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.726.243.000	5.647.914.213	(6.078.328.787)	52 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	373.694.000	373.694.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	15.614.144.000	15.614.144.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.262.873.000	3.568.392.000	(1.694.481.000)	32 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	410.170.000	404.808.000	(5.362.000)	1 %
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	200.000.000	192.718.000	(7.282.000)	4 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	480.000.000	444.873.800	(35.126.200)	7 %
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	593.500.000	565.900.000	(27.600.000)	5 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	21.071.841.000	21.071.841.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	21.071.841.000	21.071.841.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	21.071.841.000	21.071.841.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	101.027.334.000	104.378.742.000	3.351.408.000	3 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	101.027.334.000	104.378.742.000	3.351.408.000	3 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	101.027.334.000	104.378.742.000	3.351.408.000	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.540.018.000	83.740.018.000	31.200.000.000	59 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.500.000.000	44.500.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.500.000.000	44.500.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.000.000.000	11.000.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.500.000.000	17.500.000.000	0	0 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8.040.018.000	39.240.018.000	31.200.000.000	388 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.040.018.000	39.240.018.000	31.200.000.000	388 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.040.018.000	39.240.018.000	31.200.000.000	388 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.000.000.000	16.965.834.930	965.834.930	6 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000.000	16.965.834.930	965.834.930	6 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000	16.965.834.930	965.834.930	6 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000	16.965.834.930	965.834.930	6 %
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000	16.965.834.930	965.834.930	6 %
	Jumlah Pendapatan	1.147.533.420.000	1.153.285.898.059	5.752.478.059	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	820.819.472.066	869.589.006.243	48.769.534.177	6 %
5.1.01	Belanja Pegawai	507.135.778.780	493.338.142.708	(13.797.636.072)	3 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358.211.405.382	346.732.102.265	(11.479.303.117)	3 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	268.153.087.887	259.733.600.968	(8.419.486.919)	3 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	219.191.419.630	212.114.020.178	(7.077.399.452)	3 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.961.668.257	47.619.580.790	(1.342.087.467)	3 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.768.630.832	24.823.957.110	(944.673.722)	4 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.557.008.354	20.011.247.578	(545.760.776)	3 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.211.622.478	4.812.709.532	(398.912.946)	8 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.021.380.711	7.520.802.851	(500.577.860)	6 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.021.380.711	7.520.802.851	(500.577.860)	6 %
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0	0	0	0 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.981.559.785	15.310.864.065	(670.695.720)	4 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.981.559.785	15.310.864.065	(670.695.720)	4 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	0 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.350.006.369	5.803.388.393	(546.617.976)	9 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.142.297.491	2.786.473.393	(355.824.098)	11 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.207.708.878	3.016.915.000	(190.793.878)	6 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.143.387.181	15.066.333.494	(1.077.053.687)	7 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.201.538.454	11.582.540.614	(618.997.840)	5 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.941.848.727	3.483.792.880	(458.055.847)	12 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	326.998.575	286.798.794	(40.199.781)	12 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	326.998.575	286.798.794	(40.199.781)	12 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0	0	0	0 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.953.042	9.867.592	(85.450)	1 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.068.374	7.075.308	(993.066)	12 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.884.668	2.792.284	907.616	48 %
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	15.515.801.000	16.216.488.998	700.687.998	5 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	13.436.441.000	15.022.049.730	1.585.608.730	12 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.079.360.000	1.194.439.268	(884.920.732)	43 %
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	486.600.000	500.000.000	13.400.000	3 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	458.300.000	440.000.000	(18.300.000)	4 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	28.300.000	60.000.000	31.700.000	112 %
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.454.000.000	1.460.000.000	6.000.000	0 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.375.000.000	1.300.000.000	(75.000.000)	5 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	79.000.000	160.000.000	81.000.000	103 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	30.950.436.172	27.779.877.274	(3.170.558.898)	10 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.818.436.172	27.724.677.274	(3.093.758.898)	10 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	30.419.978.172	27.724.677.274	(2.695.300.898)	9 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	398.458.000	0	(398.458.000)	100 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	132.000.000	55.200.000	(76.800.000)	58 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	132.000.000	55.200.000	(76.800.000)	58 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	92.350.864.336	92.770.051.835	419.187.499	0 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35.000.000	35.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa	35.000.000	35.000.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Umum-Pelayanan Kesehatan				
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	64.086.952.000	64.086.952.000	0	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	64.086.952.000	64.086.952.000	0	0 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	9.869.010.000	9.869.010.000	0	0 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	9.869.010.000	9.869.010.000	0	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.118.000.000	2.118.000.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.118.000.000	2.118.000.000	0	0 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.291.110.500	9.038.704.585	(252.405.915)	3 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.291.110.500	9.038.704.585	(252.405.915)	3 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.770.791.836	7.622.385.250	851.593.414	13 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.168.161.836	7.288.055.250	1.119.893.414	18 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	602.630.000	334.330.000	(268.300.000)	45 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	180.000.000	0	(180.000.000)	100 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	180.000.000	0	(180.000.000)	100 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.328.870.000	12.821.110.000	(507.760.000)	4 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000	671.790.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000	671.790.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000	48.930.000	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000	48.930.000	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000	72.800.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000	72.800.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000	57.582.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000	57.582.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000	974.190.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000	974.190.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000	107.496.000	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000	107.496.000	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.750.000	32.750.000	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.750.000	32.750.000	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000	3.780.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000	3.780.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000	567.000.000	(378.000.000)	40 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000	567.000.000	(378.000.000)	40 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000	896.000	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000	896.000	0	0 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000	57.000	0	0 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000	57.000	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.433.944.000	2.304.184.000	(129.760.000)	5 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	149.760.000	20.000.000	(129.760.000)	87 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.080.000	6.080.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.104.000	10.104.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.268.000.000	2.268.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.050.000.000	4.050.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.050.000.000	4.050.000.000	0	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	153.435.000	153.435.000	0	0 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	153.435.000	153.435.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.313.778	166.313.778	0	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.739.200	6.739.200	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.739.200	6.739.200	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.213.636	6.213.636	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.213.636	6.213.636	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	479.107	479.107	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	479.107	479.107	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835	1.835	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835	1.835	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	706.800.000	591.000.000	(115.800.000)	16 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000	111.000.000	(115.800.000)	51 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000	111.000.000	(115.800.000)	51 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	480.000.000	480.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	480.000.000	480.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.421.089.112	12.477.687.556	1.056.598.444	9 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	11.421.089.112	12.477.687.556	1.056.598.444	9 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	11.421.089.112	12.477.687.556	1.056.598.444	9 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.620.965.286	302.287.437.198	3.666.471.912	1 %
5.1.02.01	Belanja Barang	38.210.999.985	38.517.624.574	306.624.589	1 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.203.499.985	38.507.624.574	304.124.589	1 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	804.172.000	44.772.070	(759.399.930)	94 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	122.380.000	93.770.000	(28.610.000)	23 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.469.589.800	1.243.256.800	(226.333.000)	15 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	56.500.000	67.000.000	10.500.000	19 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.666.987.500	1.623.487.500	(43.500.000)	3 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	229.500	229.500	100 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	17.700.000	22.524.000	4.824.000	27 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	253.455.000	843.176.230	589.721.230	233 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	253.000.000	390.000.000	137.000.000	54 %
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0	900.000	900.000	100 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.300.000	3.300.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.399.736.815	2.698.273.201	298.536.386	12 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	820.000	820.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.677.602.200	2.670.225.489	(7.376.711)	0 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	74.920.000	70.690.000	(4.230.000)	6 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	534.911.000	547.042.000	12.131.000	2 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.674.868.500	2.604.533.350	(70.335.150)	3 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	169.568.000	195.692.550	26.124.550	15 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	198.700.000	275.760.000	77.060.000	39 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	48.300.000	52.800.000	4.500.000	9 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.500.000	13.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	191.690.000	175.020.000	(16.670.000)	9 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.529.960.000	3.519.837.307	(10.122.693)	0 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.110.518.022	4.321.564.059	211.046.037	5 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80.150.000	80.150.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	27.000.000	27.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.473.833.348	8.372.296.248	(101.537.100)	1 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.719.790.000	3.267.250.000	547.460.000	20 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	57.480.000	262.050.000	204.570.000	356 %
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	15.200.000	15.200.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.348.152.800	2.998.749.270	(349.403.530)	10 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	39.875.000	35.025.000	(4.850.000)	12 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	728.295.000	786.255.000	57.960.000	8 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	47.000.000	47.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	153.000.000	153.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0	7.500.000	7.500.000	100 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	56.050.000	99.950.000	43.900.000	78 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	238.520.000	154.700.000	(83.820.000)	35 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	106.500.000	106.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	75.025.000	1.175.000	(73.850.000)	98 %
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	31.200.000	37.700.000	6.500.000	21 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0	0	0	0 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	105.000.000	105.500.000	500.000	0 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	242.550.000	213.950.000	(28.600.000)	12 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	380.700.000	202.500.000	(178.200.000)	47 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.500.000	10.000.000	2.500.000	33 %
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	7.500.000	10.000.000	2.500.000	33 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	82.082.587.604	81.029.995.950	(1.052.591.654)	1 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.620.816.604	36.323.384.950	(2.297.431.654)	6 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.846.940.304	5.239.090.304	(1.607.850.000)	23 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	950.050.000	916.750.000	(33.300.000)	4 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	591.300.000	233.100.000	(358.200.000)	61 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	72.000.000	73.500.000	1.500.000	2 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	61.600.000	26.000.000	(35.600.000)	58 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	285.000.000	285.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	121.200.000	121.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	78.000.000	78.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.958.402.000	3.192.652.000	234.250.000	8 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	80.800.000	21.800.000	(59.000.000)	73 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	158.400.000	158.400.000	100 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.641.650.000	2.639.400.000	(2.250.000)	0 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	198.000.000	198.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	54.000.000	51.000.000	(3.000.000)	6 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	3.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.400.000	0	(5.400.000)	100 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.606.400.000	5.269.935.110	1.663.535.110	46 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.947.900.000	1.632.500.000	(315.400.000)	16 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	816.600.000	990.000.000	173.400.000	21 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	479.200.000	540.400.000	61.200.000	13 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	216.000.000	312.000.000	96.000.000	44 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	14.400.000	100.800.000	86.400.000	600 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	300.000.000	166.200.000	(133.800.000)	45 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	17.500.000	10.500.000	(7.000.000)	40 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	65.000.000	75.940.000	10.940.000	17 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	8.000.000	7.003.200	(996.800)	12 %
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.744.600	2.522.100	(222.500)	8 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.643.329.000	1.970.840.000	(4.672.489.000)	70 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	54.000.000	54.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	187.000.000	108.070.000	(78.930.000)	42 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	29.520.000	28.560.000	(960.000)	3 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	40.400.000	60.550.000	20.150.000	50 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	319.500.000	354.500.000	35.000.000	11 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	273.790.000	225.150.000	(48.640.000)	18 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	340.820.000	236.790.000	(104.030.000)	31 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.325.429.200	1.276.181.935	(49.247.265)	4 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	242.500.000	248.710.000	6.210.000	3 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	356.274.000	1.844.751.900	1.488.477.900	418 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.500.000	8.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	342.000.000	363.829.500	21.829.500	6 %
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	4.100.000.000	4.364.000.000	264.000.000	6 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	24.000.000	0	(24.000.000)	100 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	310.000.000	310.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.402.067.500	2.323.658.901	921.591.401	66 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.433.605.000	35.447.000.000	13.395.000	0 %
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.086.605.000	2.100.000.000	13.395.000	1 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.526.179.200	30.526.179.200	0	0 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.673.820.800	2.673.820.800	0	0 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000.000	63.000.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	78.000.000	78.000.000	0	0 %
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	172.000.000	352.600.000	180.600.000	105 %
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	172.000.000	352.600.000	180.600.000	105 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	994.890.000	1.065.595.000	70.705.000	7 %
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	265.540.000	265.540.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	61.250.000	112.450.000	51.200.000	84 %
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.000.000	54.000.000	11.000.000	26 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	203.700.000	236.605.000	32.905.000	16 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.400.000	20.500.000	(11.900.000)	37 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	343.000.000	313.000.000	(30.000.000)	9 %
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	31.000.000	48.500.000	17.500.000	56 %
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.839.376.000	2.630.495.000	791.119.000	43 %
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	413.500.000	386.400.000	(27.100.000)	7 %
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisina/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.000.000	2.400.000	(3.600.000)	60 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.418.376.000	2.168.195.000	749.819.000	53 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	72.000.000	72.000.000	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.250.900.000	2.983.421.000	732.521.000	33 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	53.000.000	55.000.000	2.000.000	4 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0	275.000.000	275.000.000	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	308.400.000	331.350.000	22.950.000	7 %
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.100.000.000	1.431.523.000	331.523.000	30 %
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0	97.000.000	97.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	79.500.000	82.500.000	3.000.000	4 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0	63.048.000	63.048.000	100 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	160.000.000	98.000.000	(62.000.000)	39 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.756.000.000	2.212.500.000	(543.500.000)	20 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.624.900.000	1.321.400.000	(303.500.000)	19 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	83.600.000	83.600.000	0	0 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	270.000.000	30.000.000	(240.000.000)	89 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	777.500.000	777.500.000	0	0 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.325.200.700	9.491.145.764	165.945.064	2 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	0	0	0 %
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.044.651.700	5.474.688.604	(569.963.096)	9 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000	42.000.000	(108.000.000)	72 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.228.028.200	3.737.993.720	(490.034.480)	12 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	130.000.000	58.000.000	(72.000.000)	55 %
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	304.000.000	188.000.000	(116.000.000)	38 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	382.000.000	327.250.000	(54.750.000)	14 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	287.000.000	539.500.000	252.500.000	88 %
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	25.000.000	0	(25.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	36.187.500	44.480.616	8.293.116	23 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	0	0	0 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	71.658.000	86.436.304	14.778.304	21 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.500.000	11.500.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2.530.000	12.915.000	10.385.000	410 %
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.000.000	18.000.000	13.000.000	260 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan	1.000.000	0	(1.000.000)	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film				
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.380.000	1.380.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.000.000	0	(5.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.000.000	12.404.964	10.404.964	520 %
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer Unit-Komputer Jaringan	72.000.000	82.000.000	10.000.000	14 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	154.640.000	148.500.000	(6.140.000)	4 %
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	33.200.000	59.390.000	26.190.000	79 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	97.528.000	89.938.000	(7.590.000)	8 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.667.549.000	1.757.457.160	89.908.160	5 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	994.239.000	1.171.118.000	176.879.000	18 %
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0	15.500.000	15.500.000	100 %
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	603.310.000	570.839.160	(32.470.840)	5 %
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	40.000.000	0	(40.000.000)	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000	0	(30.000.000)	100 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.563.000.000	2.259.000.000	696.000.000	45 %
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	146.000.000	267.000.000	121.000.000	83 %
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0	195.000.000	195.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	49.000.000	59.000.000	10.000.000	20 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	208.000.000	578.000.000	370.000.000	178 %
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.957.319.892	53.920.248.855	4.962.928.963	10 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.837.319.892	53.800.248.855	4.962.928.963	10 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.885.440.996	16.029.863.896	2.144.422.900	15 %
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.458.000.000	4.545.200.000	1.087.200.000	31 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.754.218.896	23.924.786.174	2.170.567.278	10 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.302.390.000	8.702.128.785	(600.261.215)	6 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	437.270.000	598.270.000	161.000.000	37 %
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	120.000.000	120.000.000	0	0 %
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri	120.000.000	120.000.000	0	0 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.989.163.866	5.979.322.318	(9.841.548)	0 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	1.332.480.000	526.718.000	(805.762.000)	60 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	332.480.000	526.718.000	194.238.000	58 %
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.656.683.866	5.452.604.318	795.920.452	17 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.656.683.866	5.452.604.318	795.920.452	17 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.446.690.000	45.446.690.000	0	0 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.446.690.000	45.446.690.000	0	0 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.446.690.000	45.446.690.000	0	0 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.609.003.239	67.902.409.737	(706.593.502)	1 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.609.003.239	67.902.409.737	(706.593.502)	1 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.609.003.239	67.902.409.737	(706.593.502)	1 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	7.378.500.000	7.378.500.000	100 %
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	7.378.500.000	7.378.500.000	100 %
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	7.378.500.000	7.378.500.000	100 %
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	7.378.500.000	7.378.500.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	14.462.970.000	66.192.886.337	51.729.916.337	358 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.800.417.552	65.530.333.889	51.729.916.337	375 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.430.847.552	26.242.215.364	21.811.367.812	492 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.557.847.552	16.462.847.552	14.905.000.000	957 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.853.000.000	9.759.367.812	6.906.367.812	242 %
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	20.000.000	20.000.000	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.312.370.000	4.362.870.000	50.500.000	1 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	50.500.000	50.500.000	100 %
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.312.370.000	4.312.370.000	0	0 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.057.200.000	34.925.248.525	29.868.048.525	591 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.000.000.000	3.260.000.000	260.000.000	9 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.857.200.000	31.665.248.525	29.808.048.525	1.605 %
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448	662.552.448	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448	662.552.448	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448	662.552.448	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	599.758.000	392.040.000	(207.718.000)	35 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	331.698.000	289.980.000	(41.718.000)	13 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	331.698.000	289.980.000	(41.718.000)	13 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	331.698.000	289.980.000	(41.718.000)	13 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	111.000.000	0	(111.000.000)	100 %
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	111.000.000	0	(111.000.000)	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	111.000.000	0	(111.000.000)	100 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	157.060.000	102.060.000	(55.000.000)	35 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	147.060.000	102.060.000	(45.000.000)	31 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	147.060.000	102.060.000	(45.000.000)	31 %
5.2	BELANJA MODAL	170.405.785.934	231.068.015.039	60.662.229.105	36 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.747.238.238	19.615.411.317	868.173.079	5 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	94.900.000	78.887.500	(16.012.500)	17 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	94.900.000	78.887.500	(16.012.500)	17 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	13.900.000	16.400.000	2.500.000	18 %
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	0	1.950.000	1.950.000	100 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	81.000.000	60.537.500	(20.462.500)	25 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	160.000.000	109.500.000	(50.500.000)	32 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	109.500.000	109.500.000	100 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0	0 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0	0 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	109.500.000	109.500.000	100 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	160.000.000	0	(160.000.000)	100 %
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	160.000.000	0	(160.000.000)	100 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	12.000.000	12.000.000	100 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	12.000.000	12.000.000	100 %
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0	12.000.000	12.000.000	100 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.710.582.600	3.268.865.220	558.282.620	21 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN FENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	603.539.000	737.679.317	134.140.317	22 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	603.539.000	737.679.317	134.140.317	22 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.094.543.600	2.518.685.903	424.142.303	20 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.414.879.000	1.634.595.880	219.716.880	16 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.000.000	15.575.923	1.575.923	11 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.000.000	134.500.000	116.500.000	647 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	35.000.000	91.000.000	56.000.000	160 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	608.864.600	639.514.100	30.649.500	5 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.800.000	3.500.000	(300.000)	8 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.500.000	12.500.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0	0	0	0 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0	0	0 %
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.500.000	7.500.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	204.500.000	210.300.000	5.800.000	3 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	194.500.000	185.300.000	(9.200.000)	5 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	194.500.000	185.300.000	(9.200.000)	5 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000	25.000.000	15.000.000	150 %
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	10.000.000	25.000.000	15.000.000	150 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.284.801.689	12.953.860.085	(330.941.604)	2 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.449.879.910	1.089.879.910	(360.000.000)	25 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	159.389.250	159.389.250	0	0 %
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	360.000.000	0	(360.000.000)	100 %
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	312.583.864	312.583.864	0	0 %
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	184.481.895	184.481.895	0	0 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	433.424.901	433.424.901	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.834.921.779	11.863.980.175	29.058.396	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.834.921.779	11.863.980.175	29.058.396	0 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	62.000.000	75.500.000	13.500.000	22 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0	15.000.000	15.000.000	100 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	12.000.000	10.500.000	(1.500.000)	13 %
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	12.000.000	10.500.000	(1.500.000)	13 %
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.820.546.300	2.084.735.854	264.189.554	15 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.219.640.000	1.299.383.900	79.743.900	7 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	31.000.000	36.000.000	5.000.000	16 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	621.500.000	635.319.000	13.819.000	2 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	567.140.000	628.064.900	60.924.900	11 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	600.906.300	785.351.954	184.445.654	31 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	600.906.300	785.351.954	184.445.654	31 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	389.907.649	801.762.658	411.855.009	106 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	389.907.649	801.762.658	411.855.009	106 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	389.907.649	801.762.658	411.855.009	106 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.467.018.000	82.329.764.567	14.862.746.567	22 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.414.018.000	82.110.331.067	14.696.313.067	22 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.414.018.000	81.462.331.067	14.048.313.067	21 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.850.000.000	3.251.312.460	1.401.312.460	76 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0	0	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	22.536.827.000	23.417.095.419	880.268.419	4 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.667.191.000	48.649.030.188	8.981.839.188	23 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0	2.216.000.000	2.216.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.660.000.000	3.628.893.000	968.893.000	36 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	700.000.000	300.000.000	(400.000.000)	57 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	648.000.000	648.000.000	100 %
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0	648.000.000	648.000.000	100 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	53.000.000	8.000.000	(45.000.000)	85 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	53.000.000	8.000.000	(45.000.000)	85 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	53.000.000	8.000.000	(45.000.000)	85 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	211.433.500	211.433.500	100 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	211.433.500	211.433.500	100 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	211.433.500	211.433.500	100 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.355.169.696	128.360.355.720	45.005.186.024	54 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	77.943.056.185	123.938.168.929	45.995.112.744	59 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	77.093.056.185	122.174.523.243	45.081.467.058	58 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	56.150.586.185	106.403.306.428	50.252.720.243	89 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	15.631.250.000	12.434.496.815	(3.196.753.185)	20 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	5.311.220.000	3.336.720.000	(1.974.500.000)	37 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	850.000.000	1.763.645.686	913.645.686	107 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	850.000.000	1.763.645.686	913.645.686	107 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.138.750.000	1.608.823.280	470.073.280	41 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	878.750.000	1.338.823.280	460.073.280	52 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	878.750.000	1.338.823.280	460.073.280	52 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	260.000.000	270.000.000	10.000.000	4 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	260.000.000	270.000.000	10.000.000	4 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	430.307.411	395.307.411	(35.000.000)	8 %
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	270.307.411	295.307.411	25.000.000	9 %
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	270.307.411	295.307.411	25.000.000	9 %
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	160.000.000	100.000.000	(60.000.000)	38 %
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	160.000.000	100.000.000	(60.000.000)	38 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.843.056.100	2.418.056.100	(1.425.000.000)	37 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.343.056.100	2.418.056.100	75.000.000	3 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.343.056.100	2.418.056.100	75.000.000	3 %
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	100 %
5.2.04.04.03.0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	100 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	256.360.000	339.050.000	82.690.000	32 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	206.360.000	309.050.000	102.690.000	50 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.360.000	109.050.000	102.690.000	1.615 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	6.360.000	0	(6.360.000)	100 %
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0	109.050.000	109.050.000	100 %
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	40 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	40 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	20.000.000	0	(20.000.000)	100 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	580.000.000	423.433.435	(156.566.565)	27 %
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0 %
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0 %
5.2.06.01.01.0003	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	0	0	0	0 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	580.000.000	423.433.435	(156.566.565)	27 %
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	580.000.000	423.433.435	(156.566.565)	27 %
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	580.000.000	423.433.435	(156.566.565)	27 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	4.300.000.000	(10.700.000.000)	71 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	4.300.000.000	(10.700.000.000)	71 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	4.300.000.000	(10.700.000.000)	71 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	4.300.000.000	(10.700.000.000)	71 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	4.300.000.000	(10.700.000.000)	71 %
5.4	BELANJA TRANSFER	141.308.162.000	163.006.176.875	21.698.014.875	15 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	915.000.000	911.093.875	(3.906.125)	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	255.000.000	255.000.000	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	255.000.000	255.000.000	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	255.000.000	255.000.000	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	660.000.000	656.093.875	(3.906.125)	1 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	660.000.000	656.093.875	(3.906.125)	1 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	660.000.000	656.093.875	(3.906.125)	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	140.393.162.000	162.095.083.000	21.701.921.000	15 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	140.393.162.000	162.095.083.000	21.701.921.000	15 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.365.828.000	57.716.341.000	18.350.513.000	47 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.365.828.000	57.716.341.000	18.350.513.000	47 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.027.334.000	104.378.742.000	3.351.408.000	3 %
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.027.334.000	104.378.742.000	3.351.408.000	3 %
	Jumlah Belanja	1.147.533.420.000	1.267.963.198.157	120.429.778.157	10 %
	Total Surplus/(Defisit)	0	(114.677.300.098)	(114.677.300.098)	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	114.677.300.098	114.677.300.098	100 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	114.677.300.098	114.677.300.098	100 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	139.714.861	139.714.861	100 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0	139.714.861	139.714.861	100 %
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	139.714.861	139.714.861	100 %
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0	92.720.858.351	92.720.858.351	100 %
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0	92.720.858.351	92.720.858.351	100 %
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0	74.688.518.712	74.688.518.712	100 %
6.1.01.02.01.0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0	134.344.619	134.344.619	100 %
6.1.01.02.01.0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0	646.893.000	646.893.000	100 %
6.1.01.02.01.0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0	5.991.689.541	5.991.689.541	100 %
6.1.01.02.01.0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0	1.276.078.525	1.276.078.525	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.02.01.0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0	772.573.280	772.573.280	100 %
6.1.01.02.01.0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	0	115.708.965	115.708.965	100 %
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0	634.946.800	634.946.800	100 %
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0	2.250.000	2.250.000	100 %
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0	386.707.100	386.707.100	100 %
6.1.01.02.01.0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0	100.000.000	100.000.000	100 %
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0	6.078.328.787	6.078.328.787	100 %
6.1.01.02.01.0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer	0	1.694.481.000	1.694.481.000	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
6.1.01.02.01.0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	0	5.362.000	5.362.000	100 %
6.1.01.02.01.0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	808.822	808.822	100 %
6.1.01.02.01.0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0	7.282.000	7.282.000	100 %
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0	35.126.200	35.126.200	100 %
6.1.01.02.01.0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	122.159.000	122.159.000	100 %
6.1.01.02.01.0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	27.600.000	27.600.000	100 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	21.816.726.886	21.816.726.886	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	21.816.726.886	21.816.726.886	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	21.816.726.886	21.816.726.886	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	114.677.300.098	114.677.300.098	100 %

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	0	114.677.300.098	114.677.300.098	100 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

Bupati Tana Toraja


THEOFILUS ALLORERUNG